

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman perencanaan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkup BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, yang merupakan tahap keempat dalam pentahapan Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah Tahun 2018-2023. RKPD Tahun 2022 merupakan tahapan pematapan menjelang berakhirnya periode pembangunan daerah jangka menengah pada tahun 2023. Untuk itu, pada tahun 2022 diperlukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah agar dapat tercapai sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang pengelolaan keuangan daerah. Renja BPKAD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah yang sifatnya lebih operasional dan menjadi salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Selain itu, dalam pelaksanaan Renja BPKAD nantinya pada tahun berjalan, akan menjadi acuan dalam melakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui capaian kinerja BPKAD yang akan dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjiP).

Penyusunan Renja BPKAD Tahun 2022 dilakukan dengan mendasarkan pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2022, Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Jawa Tengah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

tahun sebelumnya, serta dinamika permasalahan yang dihadapi. Dalam menyusun Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya dalam rangka pencapaian sasaran dan target pada Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023. Sinergitas dan penyesuaian kebijakan penganggaran yang telah ditentukan berdasarkan target kinerja pada RKPD Tahun 2022 harus sinkron dan konsisten dengan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Platform Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

## 1.2 Proses Penyusunan

Rancangan Renja BPKAD Perangkat Daerah (PD) mengacu pada rumusan kerangka awal RKPD, untuk itu penyusunannya dilakukan secara simultan dan paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan kajian terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja pencapaian Renstra PD, selanjutnya Renja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPKAD dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

a. Persiapan penyusunan, meliputi:

- 1) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja PD;
- 2) orientasi mengenai Renja PD;

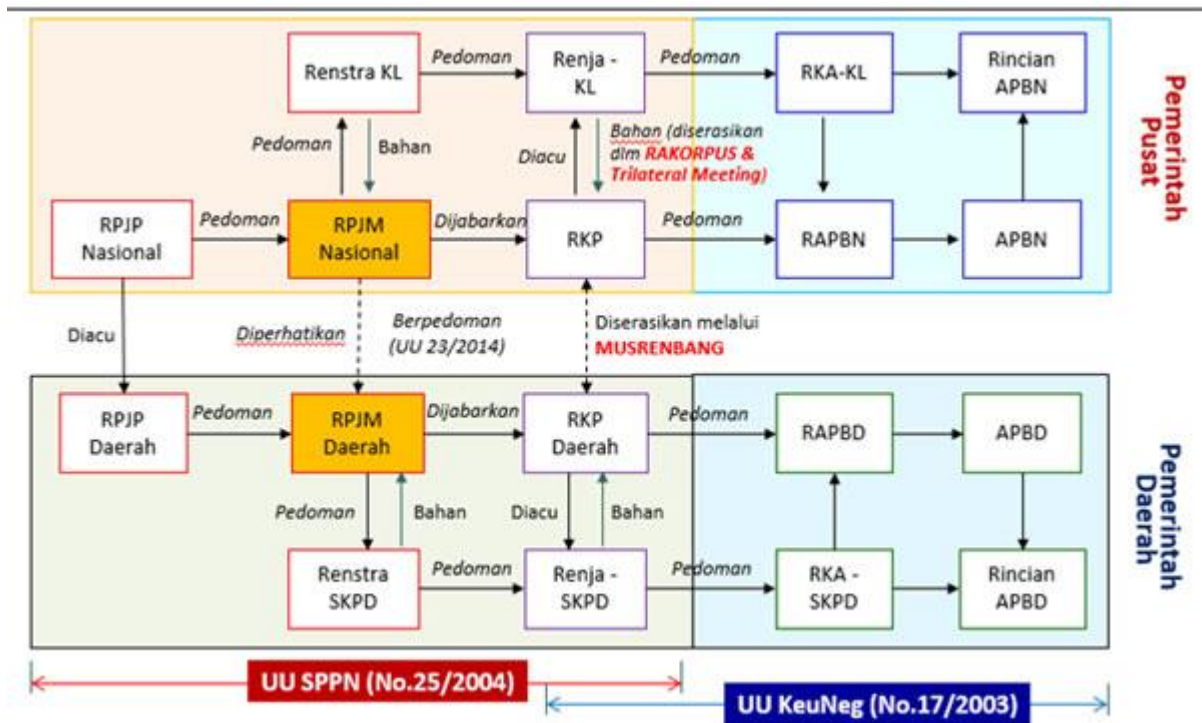
- 3) penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja PD; dan
  - 4) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.
- b. Penyusunan rancangan awal, Ranwal Renja PD berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi Renja PD Tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan, Ranwal Renja PD mencakup analisis gambaran pelayanan PD dan hasil evaluasi Renja PD tahun lalu. Hasil perumusan rancangan awal Renja PD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
    - 1) pendahuluan;
    - 2) hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
    - 3) tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
    - 4) rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
    - 5) penutup.
  - c. Penyusunan rancangan merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD yang mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD;
  - d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan;
  - e. lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja PD;
  - f. Perumusan rancangan akhir merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD;
  - g. Penetapan.

### 1.3 Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja BPKAD sebagai dokumen perencanaan tahunan yang didasarkan pada penjabaran rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Untuk itu, diperlukan keterpaduan dan keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran dalam rangka mewujudkan sistem perencanaan yang terpadu dan sistematis, sehingga seluruh dokumen-dokumen perencanaan yang disusun haruslah ada keterkaitan satu sama lain.

GAMBAR 1.1

KETERKAITAN HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN SESUAI  
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



1.4 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja

Dasar Hukum Penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah :

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan;
- h. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah; dan
- n. Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

#### 1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat;

- b. Memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun dalam rangka mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Mempermudah pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan berkaitan dengan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022;
- d. Menjamin adanya sinergitas, konsistensi, keterkaitan dan keserasian antara dokumen perencanaan dan penganggaran dalam lingkup BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Sedangkan tujuannya penyusunan Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai upaya mewujudkan perencanaan dan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah yang tertib, efektif, efisien, terukur dan konsisten.
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan pencapaian visim misi dan tujuan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah;
- c. Menjadi pedoman dalam pencapaian sasaran pembangunan dan tolok ukur dalam mengukur serta mengevaluasi Kinerja pegawai dalam lingkup BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dokumen Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 adalah:

- BAB I      Pendahuluan  
Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II     Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu  
Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD dan

Penalihan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

- BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah  
Berisi uraian ringkas tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, dan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.
- BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Berisi tentang penjelasan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatif untuk tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023.
- BAB V Penutup  
Berisi tentang catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II  
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun 2021, terdapat perubahan nomenklatur program dan/atau kegiatan pada Renstra Tahun 2018-2023 (Murni) dan Renja Tahun 2021 BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut dapat disandingkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Persandingan Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Bidang Urusan	Program Prioritas Perangkat Daerah	
		Tahun 2020	Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi APBD Kab/Kota se Jawa Tengah	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Implementasi Penatausahaan Keuangan Daerah	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
		Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Aset Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Kegiatan Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD)	
		Kegiatan Pengamanan Aset	

		Daerah	
		Kegiatan Penyelesaian Kasus Sengketa Aset	

Capaian Kinerja Renja Perubahan BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dalam Pelaksanaan Urusan Penunjang Keuangan dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Lembar : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Target Progra m dan Kegiata n (Renja PD Thn 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Real- isasi Renja Perang kat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2021	Tingkat Capaian Realisa- si Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan</b>									
4	<b>02 Urusan Keuangan</b>									
	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	1. Persentase kabupaten/kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan	100	100	100	100	100	100	100	100
		2. Persentase penetapan APBD tepat waktu						100	100	100

					3. Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu						100	100	100
					4. Persentase realisasi serapan APBD						92	92	100
				Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten /Kota Se Jawa Tengah	Jumlah Kab/Kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai dengan kaidah perundangan	35	35	35	35	100	35	35	100
				Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	Jumlah OPD yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan	43	43	43	43	100	43	43	100
				Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan	44	44	44	44	100	44	44	100
				Kegiatan Implementasi Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang terlayani penerbitan SP2D	42	42	42	42	100	42	42	100
				<b>Program Pengelolaan Aset Daerah</b>	Persentase pemanfaatan aset daerah	67,5	62,5	65	70,23	108,05	67,5	72,84	107,91
				Kegiatan Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	Jumlah Aset yang dimanfaatkan, dan dokumen kajian pemberdayaan aset	4	4	4	9	225	4	5	125

				Kegiatan Penatausahaan BMD	Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD	43	43	43	43	100	43	43	100
				Kegiatan Pengamanan Aset Daerah	Jumlah Aset yang diamankan	41	41	41	164	400	41	41	100
				Kegiatan Penyelesaian Kasus Sengketa Aset	Jumlah Aset yang terselesaikan permasalahan kasus/sengketa	5	5	5	6	120	5	5	100
				<b>NON URUSAN</b>									
				<b>Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90	100	90	100	100	90	90	100
				Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan PD	4	4	4	4	100	4	4	100
				Kegiatan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan Perangkat Daerah	12	12	12	12	100	12	60	100
				Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12	12	12	12	100	12	60	100

			Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12	12	12	12	100	12	60	100
			Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12	12	12	12	100	12	60	100
			Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12	12	12	12	100	12	60	100
			Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12	12	12	12	100	12	60	100
			Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12	12	12	12	100	12	60	100
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan	12	12	12	12	100	12	60	100

				Dinas/ Operasional Perangkat Daerah									
				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12	12	12	12	100	12	60	100
				Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	25	25	25	25	100	25	25	100
				Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jenis Pakaian Dinas Yang Diadakan	2	2	2	2	100	2	0	0
				Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bi ntek/Seminar	50	50	50	45	90	50	50	100
				Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah layanan informasi publik bidang keuangan dan aset daerah	5	5	5	5	100	5	5	100
				Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5	5	5	5	100	5	5	100
				<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	90	100	90	100	100	90	90	100
				Kegiatan Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan	5	5	5	5	100	5	5	100

			Perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah yang disusun								
			Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	5	5	5	5	100	5	5	100

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan BPKAD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Indikator Kinerja pada urusan Penunjang bidang Keuangan digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.3

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan											
1	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemda yang sesuai kaidah Perundangan			100	100	100	100	100	100	100	100	
B	Urusan Pemerintahan Bidang Aset Daerah											
1	Persentase Pemanfaatan Aset			65	67,5	70	72,5	70,23	72,84	70	72,5	

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebagai Perangkat Daerah memiliki fungsi strategis karena mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam mewujudkan tercapainya fungsi strategis dimaksud, BPKAD Provinsi Jawa Tengah terkait langsung dengan pelaksanaan misi ke 2 (dua) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu: Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga perlu ditindaklanjuti dengan penyiapan aparatur yang berkompeten, berdedikasi tinggi, dan menjunjung tinggi nilai integritas. Disamping hal tersebut, perlu dipersiapkan pula sarana dan prasarana penunjang pemerintah serta mendapatkan jaminan perlindungan dalam rangka pelaksanaan program kerja pemerintah daerah.

Mengacu pada dokumen Renstra PD, BPKAD melaksanakan fungsi pelayanan administrasi keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) kepada kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Kabupaten/Kota dan *stakeholder*. Dalam melaksanakan fungsi pelayanan administrasi keuangan, berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan jenis pelayanan administrasi keuangan, antara lain: a) Pelayanan perbendaharaan di bidang pencairan anggaran; b) Pelayanan konsultasi bidang perpajakan, tabungan pensiun (taspen), BPJS Kesehatan/ketenagakerjaan, dan perbankan; dan c) Pelayanan evaluasi APBD dan pembinaan pengelolaan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Di bidang pelayanan administrasi barang milik daerah, BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah memberikan pelayanan pada proses pengamanan BMD melalui sertifikasi, pemagaran, pemberian patok batas dan label serta mekanisme pemindahtanganan dan penghapusan BMD. Selain itu, terkait pelaksanaan penyelenggaraan haji di Jawa Tengah, BPKAD mempunyai peranan untuk memberikan pelayanan, khususnya penyediaan tempat (embarkasi) sebagai sarana pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji.

Dalam rangka pelaksanaan administrasi keuangan dan BMD tersebut di atas, terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Dinamika regulasi bidang pengelolaan keuangan yang berpengaruh terhadap pemahaman SDM, khususnya pelayanan administrasi keuangan yang meliputi aspek perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
2. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang kurang optimal, antara lain: kurangnya pemahaman pengelola/pengurus BMD dalam menginventarisasi BMD yang berakibat pada data BMD yang tidak komprehensif dan masih adanya laporan BMD yang dikuasai oleh pihak lain tanpa izin pengguna/pengelola BMD.
3. Peningkatan sarana penunjang penyelenggaraan haji di Jawa Tengah melalui peningkatan kapasitas Gedung penginapan dan fasilitas transit (embarkasi) pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji.

Berkenaan dengan isu dinamika regulasi bidang Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut berdampak pada ketidaksesuaian dokumen penganggaran/APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian produk hukum daerah terkait pengelolaan keuangan daerah mengacu pada regulasi terbaru dan pemutakhiran sistem informasi keuangan daerah serta melaksanakan langkah koordinasi dan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Pada bidang layanan administrasi BMD, dampak yang muncul antara lain: 1) Pemanfaatan BMD yang tidak maksimal; 2) Masih adanya laporan BMD yang dikuasai oleh pihak lain tanpa izin pengguna/pengelola BMD yang berakibat pada konflik sengketa terhadap pihak lain dan lepasnya penguasaan/kepemilikan BMD; dan 3) Laporan BMD yang tidak valid yang berpotensi terhadap hasil opini/tanggapan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tantangan yang dihadapi BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kinerja pelayanan, antara lain:

1. Peningkatan pelayanan administrasi keuangan yang membutuhkan langkah percepatan, dan mengedepankan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui kebijakan *cashless* dan *paperless* yang masih dilaksanakan secara bertahap yang harus didukung dengan pengintegrasian sistem informasi;

2. Kebijakan penyetaraan fasilitas pelayanan haji pada Asrama Donohudan setingkat hotel, masih terkendala perencanaan sarana dan prasarana serta dukungan pendanaan;
3. Optimalisasi Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam bidang urusan keuangan Daerah
4. Penyelesaian Kebijakan Pengalihan Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen (P3D) antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum 100%; dan
5. Pemetaan dan Visualisasi Data Informasi Barang Milik Daerah pada SIM Aset secara komprehensif.

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan urusan Keuangan dan Aset Daerah pada 2 (dua) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
2. Semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga cukup membantu dalam pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah.
3. Adanya dinamika regulasi kebijakan Pemerintah dalam Eletronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang mendorong penerapan pelaksanaan kebijakan *paperless* dan *cashless*.

Mengacu pada isu, permasalahan, tantangan, dan peluang yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan Langkah-langkah strategis antara lain:

1. Melakukan penyesuaian produk hukum daerah terkait pengelolaan keuangan daerah dan percepatan koordinasi/pembinaan kepada seluruh perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten/Kota; dan
2. Peningkatan sarana prasarana penunjang pelayanan administrasi keuangan dan BMD, termasuk di dalamnya fasilitas penyelenggaraan haji Asrama Donohudan.

#### 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu atas Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan BPKAD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022  
Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Lembar..... dari .....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				7.735.584.275	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				8.990.319.401	
A	Bidang Keuangan				7.687.977.172	Bidang Keuangan				8.987.568.943	
I	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemda yang sesuai kaidah Perundangan	100%	7.659.276.162	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Jawa Tengah	Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu	100%	8.955.607.003	
II	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase Pemanfaatan Aset	70 %	7.750.000	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jawa Tengah	Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah	70 %	4.051.822	
III	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	BPKAD	Tersusunnya dokumen pengelolaan keuangan daerah		20.951.010	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jawa Tengah	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	75%	27.910.118	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
B	NON URUSAN				47.607.103	NON URUSAN				2.750.458	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Unit Pengelola Asrama Donohudan	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan PD	75%	47.607.103	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jawa Tengah	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	75%	2.750.458	
Total Keseluruhan					7.735.584.275	Total Keseluruhan					8.990.319.401

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/ kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada BPKAD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022  
Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN Keuangan					
USULAN NIHIL					

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” dengan fokus pembangunan diarahkan pada pemulihan industri, pariwisata dan investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana. Adapun prioritas pembangunan nasional pada Tahun 2022, meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Tugas dan Fungsi BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Tengah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah adalah untuk membantu Gubernur dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang Keuangan sub fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah, yang melaksanakan fungsi antara lain:

1. Penyusunan Kebijakan teknis di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Prioritas Nasional yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah tersebut yaitu prioritas nasional ke-4 dan ke-7, yaitu **“Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”** serta **“Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan Dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik”**.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah beserta indikatornya yang digunakan dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	%	100
2	Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	70
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	N/A	80
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A	80

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun Anggaran 2022, BPKAD Provinsi Jawa Tengah menjalankan 3 (tiga) Program, yang meliputi :

### 1. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Program Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022 ini merupakan program yang dilaksanakan oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam mengawal aktivitas pengelolaan keuangan daerah provinsi, yang meliputi :

- a. Proses atau tahapan penyusunan dokumen APBD Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dan APBD Induk Tahun Anggaran 2023, melalui kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
- b. Koordinasi pelaksanaan proses akuntansi dan pelaporan keuangan pada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, termasuk penyusunan APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. Aktivitas ini dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- c. Koordinasi pelaksanaan penatausahaan keuangan pada seluruh perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, termasuk didalamnya koordinasi dengan para stakeholder terkait seperti Perbankan, TASPEN, BPJS dan pelaporan pajak di Kantor Pajak. Aktivitas ini dilaksanakan melalui (1) kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dan (2) Kegiatan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup Keuangan Daerah;
- d. Melaksanakan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah, meliputi dokumen Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Perubahan APBD Tahun 2022 dan APBD Induk Tahun 2023. Selain itu termasuk juga aktivitas pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan di Kabupaten/Kota. Berbagai aktivitas ini ditunjang melalui kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. Penatausahaan dana transfer ke Provinsi lainnya dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah berupa Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Provinsi Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga. Aktivitas ini dilaksanakan melalui Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

### 2. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2022 ini, merupakan program yang dilaksanakan oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam mengawal aktivitas pengelolaan aset daerah di lingkungan seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kaitannya sebagai “Pengelola Barang

Milik Daerah”. Adapun aktivitasnya meliputi Perencanaan, Pemeliharaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pengamanan dan Pemberdayaan Barang Milik Daerah melalui Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

### 3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2022 ini, merupakan program yang dilaksanakan BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam mengakomodir semua kebutuhan pelaksanaan pekerjaan Birokrasi baik pada Kantor BPKAD maupun pada Unit Pengelola Asrama Donohudan. Program ini merupakan aktivitas “belanja yang bersifat mengikat” yang dibutuhkan oleh perangkat daerah untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan birokrasi selama 12 (dua belas) bulan, seperti Belanja Gaji dan Tunjangan, langganan listrik, air, internet dan telepon, sarana peralatan dan perlengkapan Gedung kantor, biaya pemeliharaan kendaraan operasional dan Gedung kantor, serta biaya logistik/makan minum pegawai.

Adapun pembiayaan aktivitas tersebut, dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan, meliputi :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menunjang prioritas pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 dan perkiraan maju Tahun 2023 dituangkan sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1  
Rumusan Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023  
Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah</b>									<b>30.660.576.000</b>		<b>33.371.972.000</b>	<b>Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</b>	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	75		80		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah</b>								<b>2.750.458.000</b>		<b>2.924.735.000</b>		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	75	2.750.458.000	80	2.924.735.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN						2.750.458.000		2.924.735.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			TAHAN DAERAH PROVINSI										
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	75	2.485.708.000	80	2.609.735.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					213.050.000		263.050.000		
						Dokumen laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen		213.050.000	1	263.050.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.000.000		100.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit					Unit Pengelolaan Asrama Donohudan	OPD Provinsi ;

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, SubKegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokas i
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												Kelas B	JAWA TENG AH -- > BOYO LALI
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit					Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01. 1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12		12		Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provin si ; JAWA TENG AH -- > BOYO LALI
		X.XX.01. 1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12		12		Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provin si ; JAWA TENG AH -- > BOYO LALI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		X.XX.01. 1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12		12		Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENG AH -- > BOYO LALI
		X.XX.01. 1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.050.000		13.050.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	13.050.000	12	13.050.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENG AH -- > BOYO LALI
		X.XX.01. 1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.00 0		150.000.00 0		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam	Bulan	12	100.000.00 0	12	150.000.00 0	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						dan luar daerah							AH
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.757.795.000		1.830.185.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen		1.757.795.000	1	1.830.185.000		Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				600.000		1.200.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan Jasa Surat Menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	600.000	12	1.200.000		Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				700.600.000		722.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	700.600.000	12	722.000.000		Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.056.595.000		1.106.985.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa	Bulan	12	1.056.595.	12	1.106.985.		Unit Pengelolaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pelayanan Umum Kantor			000		000	Asrama Donohudan Kelas B	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				514.863.000		516.500.000			
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		514.863.000	1	516.500.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			130.000.000		130.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	130.000.000	12	130.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel			30.000.000		30.000.000			
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	Unit Pengelolaan Asrama	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												Donohudan Kelas B	si ; JAWA TENG AH
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				181.500.000		181.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	181.500.000	12	181.500.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENG AH
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan					Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
		X.XX.01.1.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				173.363.000		175.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung	Bulan	12	173.363.000	12	175.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						gedung kantor							
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	Dokumen	73.5	264.750.000	74	315.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					264.750.000		315.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen		264.750.000		315.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				150.000.000		165.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	5	150.000.000	5	165.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				114.750.000		150.000.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	Dokumen	1	114.750.000	1	150.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah</b>								<b>27.910.118.000</b>		<b>30.447.237.000</b>		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	%	75	27.910.118.000	80	30.447.237.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						27.910.118.000		30.447.237.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	75	27.910.118.000	80	30.447.237.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					24.731.409.000		27.140.933.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		24.731.409.000		27.140.933.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				20.791.949.000		23.004.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	20.791.949.000	12	23.004.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		X.XX.01. 1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.869.460.000		4.062.933.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	3.869.460.000	12	4.062.933.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01. 1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Dokumen	0		0		SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01. 1.02.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				30.000.000		31.500.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Akuntansi Perangkat Daerah	Dokumen	1	30.000.000	1	31.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01. 1.02.05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10.000.000		10.500.000		
						Jumlah Laporan	Dokumen	1	10.000.000	1	10.500.000	SUB BAGIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang disusun	n					KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.06			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				15.000.000		15.750.000		
						Jumlah dokumen Tanggapan Pemeriksaan Keuangan yang disusun	Dokumen	1	15.000.000	1	15.750.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				15.000.000		15.750.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	18	15.000.000	18	15.750.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat					150.000.000		155.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Daerah									
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen		150.000.000		155.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah unit Pakaian Dinas yang diadakan	Unit						SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	0		0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.05.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				100.000.000		105.000.000		
						Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kegiatan	2	100.000.000	2	105.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		X.XX.01. 1.05.05			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
						Jumlah dokumen laporan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	0		0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01. 1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti diklat/workshop/seminar	Orang	20	50.000.000	20	50.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01. 1.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
						Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0		0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01. 1.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Perundang-Undangan								
						Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	0		0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.700.000.000		1.769.804.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen		1.700.000.000		1.769.804.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	0		0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				700.000.000		734.804.000		
						Jumlah unit Penyediaan Peralatan Kantor	Unit	0		0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Jumlah unit Penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	12	700.000.00 0	12	734.804.00 0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01. 1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				300.000.00 0		315.000.00 0		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	300.000.00 0	12	315.000.00 0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01. 1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				150.000.00 0		150.000.00 0		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	150.000.00 0	12	150.000.00 0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01. 1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah bulan tercukupinya Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01. 1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				200.000.00 0		210.000.00 0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Fasilitas Kunjungan Tamu	Bulan	12	200.000.000	12	210.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350.000.000		360.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	350.000.000	12	360.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen					SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Dinas Jabatan								
						Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.03			Pengadaan Alat Besar								
						Jumlah Unit Pengadaan Alat Besar	Unit					SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel								
						Jumlah Unit Pengadaan Meubelair	Unit					SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		X.XX.01. 1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0		0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01. 1.07.11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit						SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					667.600.00 0		693.500.00 0		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen		667.600.00 0		693.500.00 0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		X.XX.01. 1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		10.500.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan Jasa Surat Menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	10.000.000	12	10.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01. 1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				365.000.00 0		380.000.00 0		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	365.000.00 0	12	380.000.00 0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01. 1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.000.000		63.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	60.000.000	12	63.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01. 1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				232.600.00 0		240.000.00 0		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	232.600.00 0	12	240.000.00 0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					661.109.000		688.000.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	661.109.000	1	688.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				423.309.000		440.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas	Bulan	12	423.309.000	12	440.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Jabatan							
		X.XX.01. 1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	0		0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01. 1.09.05			Pemeliharaan Mebel								
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan mebel	Bulan	0		0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01. 1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.00 0		105.000.00 0		
						Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	100.000.00 0	12	105.000.00 0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		X.XX.01. 1.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Bulan	0		0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01. 1.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud								
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Aset Tetap Tak Berwujud	Bulan	0		0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01. 1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				137.800.00 0		143.000.00 0		
						Jumlah Unit Gedung yang direhab	Unit	4	137.800.00 0	4	143.000.00 0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		X.XX.01. 1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana prasarana	Bulan	0		0			SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						pendukung gedung kantor							
<b>Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah</b>									<b>4.051.822.000</b>		<b>4.253.992.000</b>	<b>Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</b>	
						Persentase pengelolaan barang milik daerah Provinsi Jawa Tengah	%	70		72.5		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	<b>Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah</b>								<b>4.051.822.000</b>		<b>4.253.992.000</b>		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Persentase Tata Kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan	%	70	4.051.822.000	72.5	4.253.992.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						4.051.822.000		4.253.992.000		
						Persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah	%	70	4.051.822.000	72.5	4.253.992.000	Bidang Aset Daerah	
				Pengelolaan Barang Milik Daerah					4.051.822.000		4.253.992.000		
						Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan	Unit	60	100.000.000	62	100.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.03.1.01.10			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				100.000.000		100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Jumlah Penambahan Barang Milik Daerah pada aset pengelola yang dimanfaatkan	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	42	375.000.000	42	400.000.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	
		5.02.03.1.01.06			Inventarisasi Barang Milik Daerah				300.000.000		300.000.000		
						Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Dokumen	41	300.000.000	41	300.000.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5.02.03.1.01.12			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				75.000.000		100.000.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen	42	75.000.000	42	100.000.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun	Dokumen	41	750.000.000	41	900.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		5.02.03.1.01.03			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				600.000.000		700.000.000		
						Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	41	600.000.000	41	700.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.03.1.01.08			Penilaian Barang Milik Daerah				150.000.000		200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Jumlah Dokumen hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen	2	150.000.000	2	200.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah	Dokumen	4	675.000.000	4	700.000.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	
		5.02.03.1.01.05			Penatausahaan Barang Milik Daerah				425.000.000		450.000.000		
						Jumlah Updating system Informasi Manajemen Barang Milik Daerah	Jenis	41	425.000.000	41	450.000.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.03.1.01.11			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				250.000.000		250.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan bahan penyusunan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	OPD	41	250.000.000	41	250.000.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah	Unit	177	2.151.822.000	233	2.153.992.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	
		5.02.03.1.01.04			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				300.000.000		300.000.000		
						Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	300.000.000	1	300.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5.02.03.1.01.07			Pengamanan Barang Milik Daerah				1.300.000.000		1.350.000.000		
						Jumlah Barang Milik Daerah yang telah terpasang label kepemilikan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Unit	15	200.000.000	15	200.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Barang Milik Daerah yang telah terpasang pagar kepemilikan	Unit	2	200.000.000	3	200.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Barang Milik Daerah yang telah terpasang patok	Unit	10	200.000.000	15	200.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Jumlah Barang Milik Daerah yang telah tersertifikasi atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Sertifikasi	150	700.000.000	200	750.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.03.1.01.09			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			150.000.000		150.000.000			
						Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terfasilitasi Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	OPD	41	150.000.000	41	150.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5.02.03.1 .01.10			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				401.822.00 0		353.992.00 0		
						Jumlah Dokumen Pemindahtanganan Barang Milik Daerah lingkup Pemeintah Provinsi	Dokume n	1	101.822.00 0	1	53.992.000	SUB BIDANG PERUBAH AN STATUS HUKUM DAN PENGAMA NAN ASET DAERAH	OPD Provin si ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Pemusnahan Barang Milik Daerah lingkup Pemerintah Provinsi	Dokume n	1	50.000.000	1	50.000.000	SUB BIDANG PERUBAH AN STATUS HUKUM DAN PENGAMA NAN ASET DAERAH	OPD Provin si ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Penghapusan Barang Milik Daerah lingkup Pemerintah Provinsi	Dokume n	1	250.000.00 0	1	250.000.00 0	SUB BIDANG PERUBAH AN	OPD Provin si ; JAWA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	TENGAH
<b>Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik</b>									<b>8.955.607.003.000</b>		<b>8.741.040.229.000</b>	<b>Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</b>	
						Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah Perundangan	%	100		100		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	<b>Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perunda</b>								<b>8.955.607.003.000</b>		<b>8.741.040.229.000</b>		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>ngan</b>												
						Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah Perundangan	%	100	8.955.607.003.000	100	8.741.040.229.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						8.955.607.003.000		8.741.040.229.000		
						Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu	%	1	8.943.336.499.000	1	8.728.166.193.000	SEKRETARIAT	
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					8.943.336.499.000		8.728.166.193.000		
						Jumlah dokumen belanja transfer Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Dokumen	1	8.943.336.499.000	1	8.728.166.193.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5.02.02.1 .05.07			Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi								
						Jumlah dokumen kebijakan dan alokasi subsidi	Dokumen	1		1		SUB BAGIAN KEUANGAN	
		5.02.02.1 .05.08			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				2.724.046.500.000		2.581.646.500.000		
						Jumlah dokumen alokasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa	Dokumen	1	2.724.046.500.000	1	2.581.646.500.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		5.02.02.1 .05.09			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				21.000.000.000		23.000.000.000		
						Jumlah dokumen pengelolaan dana darurat dan mendesak	Dokumen	1	21.000.000.000	1	23.000.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		5.02.02.1 .05.10			Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi				6.198.289.999.000		6.123.519.693.000		
						Jumlah dokumen dana bagi hasil Pemerintah Provinsi ke Kabupaten/Kota	Dokumen	1	6.198.289.999.000	1	6.123.519.693.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
						Persentase Evaluasi APBD kabupaten/kota yang tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan	%	100	470.250.000	100	485.000.000	SEKRETARIAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota					470.250.00 0		485.000.00 0		
						Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	105	470.250.00 0	105	485.000.00 0	SUB BAGIAN PROGRAM	
		5.02.02.1 .02.02			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				106.750.00 0		100.000.00 0		
						Jumlah dokumen evaluasi Raperda dan Raperkada APBD induk Kabupaten/Kota	Dokumen	35	106.750.00 0	35	100.000.00 0	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5.02.02.1 .02.03			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				106.750.00 0		100.000.00 0		
						Jumlah dokumen evaluasi Raperda dan Raperkada APBD Perubahan Kabupaten/Kota	Dokumen	35	106.750.00 0	35	100.000.00 0	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1 .02.04			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban				106.750.00 0		100.000.00 0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					n Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota								
						Jumlah dokumen evaluasi Raperda dan Raperkada APBD Pertanggungjawaban Kabupaten/Kota	Dokumen	35	106.750.000	35	100.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.02.05			Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota				100.000.000		125.000.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan asistensi pengelolaan keuangan daerah	Kabupaten/Kota	35	100.000.000	35	125.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5.02.02.1 .02.08			Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota yang terlayani konsultasi dan koordinasi pembinaan penyusunan APBD Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	35	10.000.000	35	10.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1 .02.09			Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota								
						Jumlah Kabupaten/Kota yang terlayani konsultasi dan koordinasi pembinaan penyusunan perubahan APBD Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	35	10.000.000	35	10.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.02.10			Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang				10.000.000		10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota								
						Jumlah Kabupaten/Kota yang terlayani konsultasi dan koordinasi pembinaan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	35	10.000.000	35	10.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.02.12			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				20.000.000		30.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Jumlah dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1.500.000	1	10.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	18.500.000	1	20.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Penetapan APBD tepat waktu	%	100	6.107.590.000	100	6.412.335.000	Bidang Anggaran	
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					6.107.590.000		6.412.335.000		
						Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun Dokumen	OPD	12	1.751.400.000	12	1.880.000.000	SUB BIDANG ANGGAR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Penganggaran sesuai kaidah perundangan						AN BIDANG EKONOMI DAN PEMBAN GUNAN	
		5.02.02.1 .01.01			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS								
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan bahan dokumen KUA dan PPAS	OPD	0		0		SUB BIDANG ANGGAR AN BIDANG EKONOMI DAN PEMBAN GUNAN	OPD Provin si ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1 .01.02			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS								
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan bahan dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS	OPD					SUB BIDANG ANGGAR AN BIDANG EKONOMI DAN PEMBAN	OPD Provin si ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												GUNAN	
		5.02.02.1 .01.03			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1 .01.04			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5.02.02.1 .01.05			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD								
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1 .01.06			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1 .01.07			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan				70.000.000		80.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD								
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	OPD	15	70.000.000	15	80.000.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.08			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				1.597.400.000		1.700.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan	OPD	15	1.597.400.000	15	1.700.000.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2022		2023				
								Tar get	Rp	Tar get	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD							PEMBAN GUNAN	
		5.02.02.1 .01.09			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				84.000.000		100.000.000			
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan bahan penyusunan Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran	OPD	15	84.000.000	15	100.000.000		SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1 .01.10			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2022		2023				
								Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan bahan Dokumen Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah	OPD						SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.11			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah									
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan bahan Dokumen Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	OPD						SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.12			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2022		2023				
								Tar get	Rp	Tar get	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan bahan Dokumen Perencanaan Anggaran Pembiayaan Daerah	OPD						SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.13			Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi									
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang mendapatkan pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah	OPD						SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyusun Dokumen Penganggaran sesuai kaidah perundangan	OPD	15	1.736.190.000	15	1.782.335.000		SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERIN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												TAHAN	
		5.02.02.1 .01.01			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS								
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan bahan dokumen KUA dan PPAS	OPD	0		0			SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN TAHAN
		5.02.02.1 .01.02			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS								
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan bahan dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS	OPD						SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN TAHAN
		5.02.02.1 .01.03			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan	Dokumen					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.04			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan	Dokumen					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.05			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD								
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan	Dokumen					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5.02.02.1 .01.06			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan	Dokumen					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1 .01.07			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				720.000.00 0		740.000.00 0		
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	OPD	12	720.000.00 0	12	740.000.00 0	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5.02.02.1.01.08			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				460.000.000		480.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	OPD	12	460.000.000	12	480.000.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.09			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				556.190.000		562.335.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan bahan penyusunan Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran	OPD	12	556.190.000	12	562.335.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.10			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan								
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan bahan Dokumen Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah	OPD					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.11			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah								
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan bahan Dokumen Perencanaan Anggaran Belanja	OPD					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Daerah						PEMERIN TAHAN	AH
		5.02.02.1 .01.12			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan								
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan bahan Dokumen Perencanaan Anggaran Pembiayaan Daerah	OPD					SUB BIDANG ANGGAR AN BIDANG PEMERIN TAHAN	OPD Provin si ; JAWA TENG AH
						Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun Dokumen Penganggaran sesuai kaidah perundangan	OPD	14	2.620.000. 000	14	2.750.000. 000	SUB BIDANG ANGGARA N BIDANG PENDIDIKA N DAN KESEJAHT ERAAN RAKYAT	
		5.02.02.1 .01.01			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS								
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan	OPD	0		0		SUB BIDANG ANGGARA N BIDANG PENDIDIKA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2022		2023				
								Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						bahan dokumen KUA dan PPAS							N DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		5.02.02.1.01.02			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan bahan dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS	OPD						SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		5.02.02.1.01.03			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD									
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra	Dokumen						SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5.02.02.1 .01.04			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD								
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra	Dokumen					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1 .01.05			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD								
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra	Dokumen					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1 .01.06			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun dan terverifikasi pada Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra	Dokumen					SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.07			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2.200.000.000		2.300.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	OPD	14	2.200.000.000	14	2.300.000.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5.02.02.1.01.08			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				350.000.000		360.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	OPD	14	350.000.000	14	360.000.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.09			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				70.000.000		90.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan bahan penyusunan	OPD	14	70.000.000	14	90.000.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2022		2023				
								Tar get	Rp	Tar get	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran							KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		5.02.02.1.01.10			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan									
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan bahan Dokumen Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah	OPD						SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.01.11			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah									
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan bahan Dokumen Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	OPD						SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5.02.02.1 .01.12			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan								
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan bahan Dokumen Perencanaan Anggaran Pembiayaan Daerah	OPD					SUB BIDANG ANGGARA N BIDANG PENDIDIKA N DAN KESEJAHT ERAAN RAKYAT	OPD Provin si ; JAWA TENG AH
						Persentase penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu	%	100	3.867.780. 000	100	4.060.763. 000	Bidang Akuntansi	
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					3.867.780. 000		4.060.763. 000		
						Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawab	Dokumen	1	597.654.00 0	1	606.904.00 0	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						an Pelaksanaan APBD							
		5.02.02.1 .04.08			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				597.654.00 0		606.904.00 0		
						Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	597.654.00 0	1	606.904.00 0	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	3	194.488.00 0	3	194.488.00 0	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
		5.02.02.1 .04.03			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				47.834.000		47.834.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Pemerintahan terhadap penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	OPD	17	47.834.000	17	47.834.000	SUB BIDA NG EKO NOM I DAN PEM BAN GUN AN	OPD Provinsi ; JAWA TENG AH
		5.02.02.1 .04.04			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				146.654.00 0		146.654.00 0		
						Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokume n	3	146.654.00 0	3	146.654.00 0	SUB BIDA NG EKO NOM I DAN PEM BAN GUN AN	OPD Provinsi ; JAWA TENG AH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai	OPD	12	661.045.000	12	663.913.000	SUB BIDA NG EKO NOM I DAN PEM BAN GUN AN	
		5.02.02.1 .04.02			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				114.500.000		104.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terfasilitasi Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,	OPD	12	114.500.000	12	104.000.000	SUB BIDA NG EKO NOM I	OPD Provin si ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2022		2023				
								Tar get	Rp	Tar get	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban							DAN PEM BANGUN AN	
		5.02.02.1 .04.03			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				30.000.000		30.000.000			
						Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan terhadap penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	OPD	12	30.000.000	12	30.000.000		SUB BIDA NG EKO NOM I DAN PEM BANGUN AN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5.02.02.1 .04.05			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				39.009.000		72.009.000		
						Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam penyampaian bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	OPD	12	39.009.000	12	72.009.000	SUB BIDA NG EKO NOM I DAN PEM BAN GUN AN	OPD Provin si ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5.02.02.1 .04.09			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				46.486.000		49.354.000		
						Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terfasilitasi dalam penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	OPD	12	46.486.000	12	49.354.000	SUB BIDA NG EKO NOM I DAN PEM BAN GUN AN	OPD Provin si ; JAWA TENG AH
		5.02.02.1 .04.11			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				431.050.00 0		408.550.00 0		
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terfasilitasi Pembinaan	OPD	12	431.050.00 0	12	408.550.00 0	SUB BIDA NG EKO NOM	OPD Provin si ; JAWA TENG AH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2022		2023				
								Tar get	Rp	Tar get	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi							I DAN PEM BAN GUN AN	
						Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai	OPD	17	550.609.000	17	657.289.000		SUB BIDANG PEMERINTAHAN	
		5.02.02.1.04.02				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			8.000.000		12.000.000			
						Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Pemerintahan yang terfasilitasi Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	OPD	17	8.000.000	17	12.000.000		SUB BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5.02.02.1.04.05			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				188.250.000		133.250.000		
						Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Pemerintahan dalam penyampaian bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	OPD	17	188.250.000	17	133.250.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5.02.02.1 .04.09			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				277.600.00 0		427.030.00 0		
						Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Pemerintahan yang terfasilitasi dalam penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	OPD	17	277.600.00 0	17	427.030.00 0	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1 .04.11			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				76.759.000		85.009.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan yang terfasilitasi Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	OPD	17	76.759.000	17	85.009.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai	OPD	15	1.660.006.000	15	1.734.191.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	
		5.02.02.1.04.02			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			66.454.000		76.954.000			
						Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang terfasilitasi Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,	OPD	15	66.454.000	15	76.954.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban							
		5.02.02.1.04.03			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				151.400.000		151.400.000		
						Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Pendidikan dan Kesra terhadap penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	OPD	15	151.400.000	15	151.400.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.05			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan				1.297.650.000		1.319.650.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi								
					Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Pendidikan dan Kesra dalam penyampaian bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	OPD	15	1.297.650.000	15	1.319.650.000		SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.09			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah			37.502.000		31.187.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Daerah								
						Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang terfasilitasi dalam penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	OPD	15	37.502.000	15	31.187.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.04.11			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				107.000.000		155.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang terfasilitasi Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	OPD	15	107.000.000	15	155.000.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, SubKegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokas i
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah	Tahun	5	103.124.00 0	3	103.124.00 0	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	
		5.02.02.1 .04.07			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				103.124.00 0		103.124.00 0		
						Jumlah penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah	Tahun	5	103.124.00 0	3	103.124.00 0	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provin si ; JAWA TENG AH
						Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	OPD	7	100.854.00 0	7	100.854.00 0	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	
		5.02.02.1 .04.12			Pembinaan Pengelolaan Keuangan				100.854.00 0		100.854.00 0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					BLUD Provinsi								
						Jumlah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	OPD	7	100.854.000	7	100.854.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase realisasi serapan APBD	%	92	1.824.884.000	93	1.915.938.000	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					1.674.884.000		1.760.938.000		
						Jumlah OPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan perundangan	OPD		471.384.000		476.000.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5.02.02.1 .03.06			Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				421.384.00 0		425.000.00 0		
						Jumlah Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	OPD	35	421.384.00 0	35	425.000.00 0	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1 .03.08			Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas								
						Jumlah	Dokume	0		0		SUB BIDANG	OPD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Dokumen Analisis Pembiayaan Pemerintah Daerah	n					PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	Provisi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Kebijakan Analisis Kas Pemerintah Daerah	Dokumen	0		0		SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provisi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.03.10			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				50.000.000		51.000.000		
						Jumlah Dokumen Kebijakan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	Dokumen	2	50.000.000	2	51.000.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provisi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan, SubKegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokas i
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Sub Kegiatan							
						Jumlah OPD Lingkup Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan perundangan	OPD		584.500.00 0		613.000.00 0	SUB BIDANG PERBENDAHAR AAN BIDANG Pemerintahan, PENDIDIKAN DAN KESRA	
		5.02.02.1 .03.03			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD								
						Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang terfasilitasi penerbitan Dokumen Anggaran Kas dan SPD	OPD	0			0	SUB BIDANG PERBENDAHAR AAN BIDANG Pemerintahan, PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provin si ; JAWA TENG AH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5.02.02.1 .03.09			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait								
					Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait pada Perangkat Daerah	Dokumen	0		0			SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1 .03.11			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			584.500.00 0		613.000.00 0			
					Jumlah Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kegiatan	24	584.500.00 0	24	613.000.00 0		SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan.	OPD	41	619.000.000	41	671.938.000	SUB BIDANG PENGEL OLAAN KAS DAERAH	
		5.02.02.1 .03.01			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				544.000.000		589.438.000		
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah Pemerintah Daerah	Dokume n	41	544.000.000	41	589.438.000	SUB BIDANG PENGEL OLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENG AH
		5.02.02.1 .03.04			Penatausahaan Pembiayaan Daerah								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokume n	0		0		SUB BIDANG PENGEL OLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENG AH
		5.02.02.1 .03.05			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
								2022		2023				
								Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya									
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya Pemerintah Daerah	Dokumen	0		0			SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.03.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				75.000.000		82.500.000			
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak	Dokumen	12	75.000.000	12	82.500.000		SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Ketiga (PFK) Pemerintah Daerah						DAERAH	
				Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah					150.000.000		155.000.000		
						Jumlah OPD yang diproses Pencairan	OPD	41	150.000.000	41	155.000.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	
		5.02.02.1.06.01			Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah								
						Jumlah Dokumen Analisis Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	0		0		SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator (Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, SubKegiatan)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5.02.02.1.06.02			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				100.000.000		105.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	OPD	41	100.000.000	41	105.000.000	SUB BIDANG PENGELAKAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.02.02.1.06.03			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi				50.000.000		50.000.000		
						Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	OPD	41	50.000.000	41	50.000.000	SUB BIDANG PENGELAKAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									<b>8.990.319.401.000</b>		<b>8.778.666.193.000</b>		

## BAB V

### PENUTUP

Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan yang teridentifikasi kedalam rencana target kinerja dan pendanaan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan tahun 2022. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Menyusun perencanaan secara cermat sesuai kebutuhan dengan tetap mempertimbangkan risiko pengalihan anggaran untuk kebutuhan yang lebih mendesak;
2. Melaksanakan seluruh rencana program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhitungkan secara cermat capaian target kinerja yang telah ditetapkan;
3. Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap capaian target kinerja dari program/kegiatan yang telah ditetapkan disertai pendampingan sebagai langkah tindak lanjut atas kinerja yang belum mencapai target.

Dalam rangka mengantisipasi ketidaksesuaian antara rencana dan capaian target kinerja maka perlu ditetapkan langkah-langkah tindak lanjut pada Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi program/kegiatan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan apabila terjadi kebijakan *refocusing* anggaran;
2. Melakukan penyesuaian kebutuhan anggaran sebagai tindak lanjut dinamika regulasi khususnya bidang keuangan dan aset daerah;
3. Melakukan sosialisasi terkait pemahaman regulasi mengenai keuangan dan aset daerah.

Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 ini tentu saja masih dirasakan perlu adanya perbaikan dari segi kualitas perencanaan program/kegiatan, agar dalam implementasinya dapat diterapkan dengan tetap mempertimbangkan kondisi aparatur, dukungan pendanaan, dan komitmen seluruh elemen pendukung organisasi guna mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2022.

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2022.

Semarang,

**Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DWIANTO PRIYONUGROHO, Mprof.Ac**

Pembina

NIP.19801221 200604 1 010